



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja pemerintah daerah sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.**

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama terdiri dari Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan RPJMD tahun 2021-2026.

**Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

**Pasal 4**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

**A. INDIKATOR KINERJA TUJUAN**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Tujuan 1.1. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	$IRB = (60\% \times \text{Komponen Pengungkit}) + (40\% \times \text{Komponen hasil})$ <p>*nilai IRB merujuk pada penilaian dari Kementerian PANRB</p>
Tujuan 1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien				
2.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	Indeks pelayanan publik menggambarkan tingkat kepuasan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah	$\text{Nilai Indeks} = \sum \text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai setiap aspek</li> </ul> $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai untuk setiap indikator</li> </ul> $\begin{aligned} \text{Nilai per indikator} \\ &= \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \times \text{bobot per indikator} \end{aligned}$

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																																																			
				<p>~ Formulir F-01 diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.</p> <p>~ Formulir F-02, diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan, untuk memperoleh data objektif.</p> <p>~ Formulir F-03, diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembobotan <table border="1" data-bbox="1540 654 2225 914"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>ASPEK</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kebijakan Pelayanan</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Profesionalisme SDM</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sarana Prasarana Pelayanan Publik</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sistem Infromasi Pelayanan Publik</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Konsultasi dan Pengaduan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inovasi</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>• Kategori Nilai Kinerja <table border="1" data-bbox="1540 1019 2225 1390"> <thead> <tr> <th>RANGE NILAI</th> <th>KATEGORI</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	NO.	ASPEK	BOBOT	1.	Kebijakan Pelayanan	30%	2.	Profesionalisme SDM	18%	3.	Sarana Prasarana Pelayanan Publik	15%	4.	Sistem Infromasi Pelayanan Publik	15%	5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	6.	Inovasi	7%	RANGE NILAI	KATEGORI	KETERANGAN	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
NO.	ASPEK	BOBOT																																																					
1.	Kebijakan Pelayanan	30%																																																					
2.	Profesionalisme SDM	18%																																																					
3.	Sarana Prasarana Pelayanan Publik	15%																																																					
4.	Sistem Infromasi Pelayanan Publik	15%																																																					
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%																																																					
6.	Inovasi	7%																																																					
RANGE NILAI	KATEGORI	KETERANGAN																																																					
0 – 1,00	F	Gagal																																																					
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																																					
1,51 – 2,00	D	Buruk																																																					
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																																																					
2,51 – 3,00	C	Cukup																																																					
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																																																					
3,51 – 4,00	B	Baik																																																					
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																																					
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																																					

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																				
				*Sumber: PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik																				
Tujuan 1.3. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien																								
3.	Indeks Merit System	Nilai 100-400	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	<p>*nilai sistem merit merujuk pada penilaian dari Kementerian PANRB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI</th> <th>INDEKS</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV</td> <td>325 – 400</td> <td>0,81 – 1</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>250 – 324</td> <td>0,61 – 0,8</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>175 – 249</td> <td>0,41 – 0,6</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>100 – 174</td> <td>0,2 – 0,4</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI	NILAI	INDEKS	KETERANGAN	IV	325 – 400	0,81 – 1	Sangat Baik	III	250 – 324	0,61 – 0,8	Baik	II	175 – 249	0,41 – 0,6	Kurang	I	100 – 174	0,2 – 0,4	Buruk
KATEGORI	NILAI	INDEKS	KETERANGAN																					
IV	325 – 400	0,81 – 1	Sangat Baik																					
III	250 – 324	0,61 – 0,8	Baik																					
II	175 – 249	0,41 – 0,6	Kurang																					
I	100 – 174	0,2 – 0,4	Buruk																					
Tujuan 2.1. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat																								
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja	$TPAK = \frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun)}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran</li> </ul>																				
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$																				
Tujuan 2.2. Meningkatnya perekonomian lokal																								
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Di mana:  t = PDRB tahun pengamatan  t-1 = PDRB tahun sebelumnya</p>																				

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
7.	PDRB per kapita	Juta Rp	PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu	$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{penduduk pertengahan tahun}}$
Tujuan 3.1. Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat				
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan 3 dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensi kesehatan <math display="block">I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}</math> </li> <li>• Dimensi pendidikan <math display="block">I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}</math> <math display="block">I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}</math> <math display="block">I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}</math> </li> <li>• Dimensi pengeluaran <math display="block">I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}</math> </li> </ul> <p>Pengklasifikasi capaian IPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Tinggi, apabila <math>IPM \geq 80,0</math></li> <li>2. Tinggi, apabila nilai <math>70 &lt; IPM &lt; 79,99</math></li> <li>3. Sedang, apabila nilai <math>60 &lt; IPM &lt; 69,99</math></li> <li>4. Rendah, apabila <math>IPM &lt; 60,0</math></li> </ol>



NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Tujuan 3.2. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana				
9.	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	Indeks infrastruktur wilayah merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait infrastruktur Pekerjaan Umum yang meliputi: jalan, drainase, dan irigasi serta infrastruktur perumahan dan permukiman dan tingkat pelayanan	<p style="text-align: right;"><i>Indeks infrastruktur Wilayah</i></p> $= (40\% \times \text{Indeks infrastruktur PU}) + (30\% \times \text{Indeks infrastruktur Perkim}) + (30\% \times \text{level of service})$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks infrastruktur PU           <p style="text-align: right;"><i>Indeks Infrastruktur PU</i></p> <math display="block">= (50\% \text{ jalan kondisi baik}) + (30\% \text{ layanan drainase kabupaten}) + (20\% \text{ rasio irigasi})</math> </li> <li>Indeks infrastruktur perkim           <p style="text-align: right;"><i>Indeks Infrastruktur Perkim</i></p> <math display="block">= (40\% \text{ akses rumah layak huni}) + (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) + (20\% \text{ sanitasi penanganan persampahan}) + (15\% \text{ akses air minum layak})</math> </li> <li>Level of service = proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan pelayanan dasar</li> </ul>
10.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	DDDTLH merupakan indeks komposit atau nilai gabungan dari indeks jenis-jenis jasa ekosistem yang diperoleh dengan cara melakukan perhitungan rata-rata	$IKKJE_n = \frac{\sum IKJE_a + IKJE_b + IKJE_c + \dots + IKJE_n}{\sum IKJE_{total}}$ <p>Di mana:</p> <p>IKKJE<sub>n</sub> = nilai indeks komposit jasa ekosistem          IKJE<sub>n</sub> = indeks jasa ekosistem          ∑IKKJE<sub>total</sub> = jumlah indeks jasa ekosistem (jenis ke-n)</p> <p>Nilai IKKJE → 0 ≤ IKKJE<sub>n</sub> ≤ 1</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Tujuan 3.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				
11.	Angka kemiskinan	Persen	Angka kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Di mana:  <math>\alpha = 0</math>  <math>z</math> = garis kemiskinan  <math>y_i</math> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, <math>y_i &lt; z</math>  <math>q</math> = jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  <math>n</math> = jumlah penduduk</p> <p>*angka kemiskinan merujuk pada hasil perhitungan BPS</p>
12.	Indeks Gini	Nilai	Indeks gini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh	$G = 1 - \sum_{i=1}^t P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Di mana:  <math>P_i</math> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i  <math>Q_i</math> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0-1, jika:  <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah  <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang  <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</p>
				*angka gini ratio merujuk pada hasil perhitungan BPS

## B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																																										
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah																																														
1.	Indeks Perencanaan	Persen	Indeks perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah.	<p><i>Indeks Kualitas Perencanaan</i>  <math>= (0,26 \text{ Proses}) + (0,327 \text{ Isi}) + (0,413 \text{ Jaminan Tindak Lanjut})</math></p> <p>Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skala pengukuran menggunakan 7 jenjang kualitatif dalam skala 1-10 (kuantitatif)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>SKALA</th> <th>KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1,00 – 2,28</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2,29 – 3,56</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3,57 – 4,85</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>4,86 – 6,13</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>6,14 – 7,42</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>7,43 – 8,70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>8,71 – 10,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian per aspek:</li> </ul> $\text{Nilai Skala} = \frac{\text{total skor rata - rata}}{\text{total skor ideal}} \times 10$ <p>Pembobotan Indeks Kualitas Perencanaan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DIMENSI/ASPEK</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1.</b></td> <td><b>PROSES</b></td> <td><b>0,26</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Musrenbang Desa</td> <td>0,068</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Musrenbang Kecamatan</td> <td>0,085</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Musrenbang Kabupaten</td> <td>0,107</td> </tr> <tr> <td><b>2.</b></td> <td><b>ISI</b></td> <td><b>0,327</b></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	SKALA	KATEGORI	1.	1,00 – 2,28	Sangat Tidak Baik	2.	2,29 – 3,56	Tidak Baik	3.	3,57 – 4,85	Kurang Baik	4.	4,86 – 6,13	Cukup	5.	6,14 – 7,42	Cukup Baik	6.	7,43 – 8,70	Baik	7.	8,71 – 10,00	Sangat Baik	NO.	DIMENSI/ASPEK	BOBOT	<b>1.</b>	<b>PROSES</b>	<b>0,26</b>		Musrenbang Desa	0,068		Musrenbang Kecamatan	0,085		Musrenbang Kabupaten	0,107	<b>2.</b>	<b>ISI</b>	<b>0,327</b>
NO.	SKALA	KATEGORI																																												
1.	1,00 – 2,28	Sangat Tidak Baik																																												
2.	2,29 – 3,56	Tidak Baik																																												
3.	3,57 – 4,85	Kurang Baik																																												
4.	4,86 – 6,13	Cukup																																												
5.	6,14 – 7,42	Cukup Baik																																												
6.	7,43 – 8,70	Baik																																												
7.	8,71 – 10,00	Sangat Baik																																												
NO.	DIMENSI/ASPEK	BOBOT																																												
<b>1.</b>	<b>PROSES</b>	<b>0,26</b>																																												
	Musrenbang Desa	0,068																																												
	Musrenbang Kecamatan	0,085																																												
	Musrenbang Kabupaten	0,107																																												
<b>2.</b>	<b>ISI</b>	<b>0,327</b>																																												

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																																																
				<table border="1" data-bbox="1457 232 2222 526"> <tr><td></td><td>Dokumen Pendukung</td><td>0,054</td></tr> <tr><td></td><td>Jadwal Penyusunan</td><td>0,041</td></tr> <tr><td></td><td>Penerjemahan</td><td>0,093</td></tr> <tr><td></td><td>Inovasi</td><td>0,046</td></tr> <tr><td></td><td>Instrumen Penilaian Kinerja</td><td>0,093</td></tr> <tr><td><b>3.</b></td><td><b>JAMINAN TINDAK LANJUT</b></td><td><b>0,413</b></td></tr> <tr><td></td><td>Konsistensi</td><td>0,275</td></tr> <tr><td></td><td>Serapan Anggaran</td><td>0,138</td></tr> </table> <p data-bbox="1360 565 1976 594">Kategori hasil penilaian indeks kualitas perencanaan</p> <table border="1" data-bbox="1492 597 2182 894"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>SKALA</th> <th>KATEGORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>1,00 – 2,28</td><td>Sangat Tidak Baik</td></tr> <tr><td>2.</td><td>2,29 – 3,56</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr><td>3.</td><td>3,57 – 4,85</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr><td>4.</td><td>4,86 – 6,13</td><td>Cukup</td></tr> <tr><td>5.</td><td>6,14 – 7,42</td><td>Cukup Baik</td></tr> <tr><td>6.</td><td>7,43 – 8,70</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>7.</td><td>8,71 – 10,00</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>		Dokumen Pendukung	0,054		Jadwal Penyusunan	0,041		Penerjemahan	0,093		Inovasi	0,046		Instrumen Penilaian Kinerja	0,093	<b>3.</b>	<b>JAMINAN TINDAK LANJUT</b>	<b>0,413</b>		Konsistensi	0,275		Serapan Anggaran	0,138	NO.	SKALA	KATEGORI	1.	1,00 – 2,28	Sangat Tidak Baik	2.	2,29 – 3,56	Tidak Baik	3.	3,57 – 4,85	Kurang Baik	4.	4,86 – 6,13	Cukup	5.	6,14 – 7,42	Cukup Baik	6.	7,43 – 8,70	Baik	7.	8,71 – 10,00	Sangat Baik
	Dokumen Pendukung	0,054																																																		
	Jadwal Penyusunan	0,041																																																		
	Penerjemahan	0,093																																																		
	Inovasi	0,046																																																		
	Instrumen Penilaian Kinerja	0,093																																																		
<b>3.</b>	<b>JAMINAN TINDAK LANJUT</b>	<b>0,413</b>																																																		
	Konsistensi	0,275																																																		
	Serapan Anggaran	0,138																																																		
NO.	SKALA	KATEGORI																																																		
1.	1,00 – 2,28	Sangat Tidak Baik																																																		
2.	2,29 – 3,56	Tidak Baik																																																		
3.	3,57 – 4,85	Kurang Baik																																																		
4.	4,86 – 6,13	Cukup																																																		
5.	6,14 – 7,42	Cukup Baik																																																		
6.	7,43 – 8,70	Baik																																																		
7.	8,71 – 10,00	Sangat Baik																																																		
2.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	EKPPD merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Lingkup dalam penilaian EKPP meliputi penilaian terhadap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan.	$KPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PKM \times 0,25]$ <p data-bbox="1360 1073 1467 1102">Di mana:</p> <p data-bbox="1360 1110 2013 1140">KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p data-bbox="1360 1148 1716 1177">CKM = Capaian Kinerja Makro</p> <p data-bbox="1360 1185 1903 1214">CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan</p> <p data-bbox="1360 1222 1746 1252">PKM = Perubahan Kinerja Makro</p> <p data-bbox="1360 1289 1996 1318">Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <table border="1" data-bbox="1492 1354 2182 1463"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>SKOR KINERJA</th> <th>STATUS KINERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>1,00 – 1,80</td><td>Sangat rendah</td></tr> <tr><td>2.</td><td>1,81 – 2,60</td><td>Rendah</td></tr> </tbody> </table>	NO.	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA	1.	1,00 – 1,80	Sangat rendah	2.	1,81 – 2,60	Rendah																																							
NO.	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA																																																		
1.	1,00 – 1,80	Sangat rendah																																																		
2.	1,81 – 2,60	Rendah																																																		

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA									
				<table border="1" data-bbox="1480 228 2163 342"> <tr> <td>3.</td> <td>2,61 – 3,40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3,41 – 4,20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>4,21 – 5,00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </table> <p data-bbox="1350 380 1882 410">(Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)</p> <p data-bbox="1350 451 2146 482">*nilai EKPPD merujuk pada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri</p>	3.	2,61 – 3,40	Sedang	4.	3,41 – 4,20	Tinggi	5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi
3.	2,61 – 3,40	Sedang											
4.	3,41 – 4,20	Tinggi											
5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi											
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah													
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.	$IPKD = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6$ <p data-bbox="1350 683 1456 711">Di mana:</p> <p data-bbox="1350 719 2047 750">D1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p data-bbox="1350 758 1941 789">D2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD</p> <p data-bbox="1350 797 1833 828">D3 = Transparansi pengelolaan keuangan</p> <p data-bbox="1350 836 1670 867">D4 = Penyerapan anggaran</p> <p data-bbox="1350 875 1710 906">D5 = Kondisi keuangan daerah</p> <p data-bbox="1350 914 1530 945">D6 = Opini BPK</p> <p data-bbox="1350 969 1882 1000">(Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2020)</p>									
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah													
4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai / Predikat	Nilai SAKIP merupakan evaluasi atau penilaian terhadap tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( <i>outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil ( <i>result oriented government</i> ).	$\text{Nilai SAKIP} = (30\% \text{ Perencanaan Kinerja}) + (25\% \text{ Pengukuran Kinerja}) + (15\% \text{ Pelaporan Kinerja}) + (10\% \text{ Evaluasi Internal}) + (+20\% \text{ Capaian Kinerja})$									
				<p data-bbox="1350 1292 1833 1323">Komponen dan sub-komponen penilaian:</p> <table border="1" data-bbox="1406 1323 2232 1463"> <thead> <tr> <th data-bbox="1406 1323 1488 1354">NO.</th> <th data-bbox="1488 1323 1707 1354">KOMPONEN</th> <th data-bbox="1707 1323 1857 1354">BOBOT</th> <th data-bbox="1857 1323 2232 1354">SUB-KOMPONEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1406 1354 1488 1463">1.</td> <td data-bbox="1488 1354 1707 1463">Perencanaan Kinerja</td> <td data-bbox="1707 1354 1857 1463">30%</td> <td data-bbox="1857 1354 2232 1463">• Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB-KOMPONEN	1.	Perencanaan Kinerja	30%	• Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas	
NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB-KOMPONEN										
1.	Perencanaan Kinerja	30%	• Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas										

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%)</li> <li>• Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%)</li> </ul>
				2.	Pengukuran Kinerja	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Pengukuran (5%)</li> <li>• Kualitas Pengukuran (12,5%)</li> <li>• Implementasi Pengukuran (7,5%)</li> </ul>
				3.	Pelaporan Kinerja	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Pelaporan (3%)</li> <li>• Kualitas Pelaporan (7,5%)</li> <li>• Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)</li> </ul>
				4.	Evaluasi Kinerja	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Evaluais (2%)</li> <li>• Kualitas Evaluasi (5%)</li> <li>• Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)</li> </ul>
				5.	Capaian Kinerja	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (4%)</li> <li>• Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%)</li> <li>• Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (6%)</li> </ul>
				<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	
				<p>(Sumber: PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015)</p> <p>*nilai SAKIP merujuk pada penilaian dari Kementerian PANRB</p>			

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA												
Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik																
5.	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai ketaatan penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik yang efektif dan efisien.	<p>Penilaian kepatuhan terhadap layanan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pelayanan;</li> <li>Maklumat pelayanan;</li> <li>Sistem informasi pelayanan publik;</li> <li>Sarana, prasarana dan fasilitas;</li> <li>Pelayanan khusus</li> <li>Pengelolaan pengaduan;</li> <li>Penilaian kinerja;</li> <li>Visi, misi, dan moto pelayanan;</li> <li>Atribut;</li> <li>Pelayanan terpadu.</li> </ol> <p>Kategori hasil penilaian kepatuhan:</p> <table border="1" data-bbox="1440 808 2232 954"> <thead> <tr> <th>NILAI</th> <th>ZONA</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>81 – 100</td> <td>Hijau</td> <td>Kepatuhan Tinggi</td> </tr> <tr> <td>51 – 80</td> <td>Kuning</td> <td>Kepatuhan Sedang</td> </tr> <tr> <td>0 – 50</td> <td>Merah</td> <td>Kepatuhan Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI	ZONA	PREDIKAT	81 – 100	Hijau	Kepatuhan Tinggi	51 – 80	Kuning	Kepatuhan Sedang	0 – 50	Merah	Kepatuhan Rendah
NILAI	ZONA	PREDIKAT														
81 – 100	Hijau	Kepatuhan Tinggi														
51 – 80	Kuning	Kepatuhan Sedang														
0 – 50	Merah	Kepatuhan Rendah														
Sasaran 1.2.2. Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik																
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	Indeks SPBE adalah hasil evaluasi atau penilaian yang menggambarkan tingkat kematangan ( <i>maturity level</i> ) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif,	<p>Pengukuran dari setiap kematangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).</li> <li>Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).</li> <li>Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).</li> <li>Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).</li> <li>Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).</li> </ol> $\text{Indeks SPBE} = (17\% \text{ Domain 1 Kebijakan Internal SPBE}) + (28\% \text{ Domain 2 Tata Kelola SPBE}) + (55\% \text{ Domain 3 Layanan SPBE})$												

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																																																			
			<p>transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>Bobot Domain dan Aspek</p> <table border="1" data-bbox="1422 264 2250 919"> <thead> <tr> <th>DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN</th> <th>JUMLAH INDIKATOR</th> <th>TOTAL BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>DOMAIN 1 – Kebijakan Internal SPBE</b></td> <td><b>17</b></td> <td><b>17%</b></td> </tr> <tr> <td>• Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</td> <td>7</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>• Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE</td> <td>10</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td><b>DOMAIN 2 – TATA TEKOLA SPBE</b></td> <td><b>7</b></td> <td><b>28%</b></td> </tr> <tr> <td>• Aspek 3 – Kelembagaan</td> <td>2</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>• Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan</td> <td>2</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>• Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi</td> <td>3</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td><b>DOMAIN 3 – LAYANAN SPBE</b></td> <td><b>11</b></td> <td><b>55%</b></td> </tr> <tr> <td>• Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td> <td>7</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>• Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik</td> <td>4</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kategori nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE:</p> <table border="1" data-bbox="1527 1024 2140 1247"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3,5 – &lt;4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2,6 – &lt;3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>1,8 – &lt;2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>&lt;1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sumber: PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018)</p>	DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	JUMLAH INDIKATOR	TOTAL BOBOT	<b>DOMAIN 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>	• Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%	• Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%	<b>DOMAIN 2 – TATA TEKOLA SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>	• Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%	• Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%	• Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%	<b>DOMAIN 3 – LAYANAN SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55%</b>	• Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%	• Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%	NO.	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1.	4,2 – 5,0	Memuaskan	2.	3,5 – <4,2	Sangat Baik	3.	2,6 – <3,5	Baik	4.	1,8 – <2,6	Cukup	5.	<1,8	Kurang
DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	JUMLAH INDIKATOR	TOTAL BOBOT																																																					
<b>DOMAIN 1 – Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>																																																					
• Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%																																																					
• Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%																																																					
<b>DOMAIN 2 – TATA TEKOLA SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>																																																					
• Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%																																																					
• Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%																																																					
• Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%																																																					
<b>DOMAIN 3 – LAYANAN SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55%</b>																																																					
• Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%																																																					
• Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%																																																					
NO.	NILAI INDEKS	PREDIKAT																																																					
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan																																																					
2.	3,5 – <4,2	Sangat Baik																																																					
3.	2,6 – <3,5	Baik																																																					
4.	1,8 – <2,6	Cukup																																																					
5.	<1,8	Kurang																																																					
<p>Sasaran 1.3.1. Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah</p>																																																							
7.	Indeks Kelembagaan	Persen	Indeks Kelembagaan merupakan tolak ukur yang																																																				



NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
			<p>digunakan dalam penilaian atau evaluasi terhadap kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis (organisasi berbasis kinerja).</p>	<p>PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Pembobotan sub-komponen <b>Penataan Organisasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Pemenuhan : 3%</li> <li>• Aspek Hasil Antara : 0%</li> <li>• Aspek Reform : 4,5%</li> </ul> <p>Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut.</p> $\text{Penataan Organisasi} = (3\% \text{ Aspek Pemenuhan}) + (4,5\% \text{ Aspek Reform})$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Pemenuhan</li> </ul> $\text{Aspek Pemenuhan Penataan Organisasi} = \sum_{i=1}^n I_i$ $\text{Aspek Pemenuhan} = \text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Reform</li> </ul> $\text{Aspek Reform Penataan Organisasi} = \sum_{i=1}^n I_i$ $\text{Aspek Reform} = \text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n$ <p><math>I_i</math> = penilaian indikator atau pertanyaan ke-i  Indikator 1 = penilaian indikator atau pertanyaan ke-1  Indikator 2 = penilaian indikator atau pertanyaan ke-2  Indikator n = penilaian indikator atau pertanyaan ke-n</p>
				<p>(Sumber: PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020)</p> <p>*nilai Indeks Kelembagaan merujuk pada penilaian dari BKN</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
				<p>**Menurut PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020, Indeks Kelembagaan merupakan indikator kinerja pada Program/Area Perubahan Penataan Organisasi/Kelembagaan, dengan adanya PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 maka terdapat penggunaan indeks kelembagaan mengalami penyesuaian dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sub-komponen penataan dan penguatan organisasi</p>
<p>Sasaran 1.3.2. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur</p>				
8.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	<p>Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran atau penilaian yang menggambarkan tingkat profesionalitas pegawai Asn yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}</math> <math display="block">IP_1 = W_{2k} \times R_{2k}</math> <math display="block">IP_1 = W_{3l} \times R_{3l}</math> <math display="block">IP_1 = W_{4m} \times R_{4m}</math> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}</math> <math display="block">IP_1 = W_{2k} \times R_{2k}</math> <math display="block">IP_1 = W_{3l} \times R_{3l}</math> <math display="block">IP_1 = W_{4m} \times R_{4m}</math> </div> </div> </div> <p>Di mana:  IP = Indeks Profesionalisme  IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i  IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> x R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikali rating jawaban indikator kualifikasi ke-j  W<sub>2k</sub> x R<sub>2k</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikali rating jawaban indikator kualifikasi ke-k  W<sub>3l</sub> x R<sub>3l</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikali rating jawaban indikator kualifikasi ke-l</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																																	
				<p><math>W_{4m} \times R_{4m}</math> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikali rating jawaban indikator kualifikasi ke-m</p> <p>Bobot Dimensi</p> <table border="1" data-bbox="1537 370 2104 553"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DIMENSI</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kualifikasi</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kompetensi</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Disiplin</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kategori tingkat profesionalitas ASN</p> <table border="1" data-bbox="1517 626 2123 849"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NILAI</th> <th>TINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>91 – 100</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>81 – 90</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>71 – 80</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>61 – 70</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>60 ke bawah</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sumber: Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019)</p> <p>*nilai Indeks Profesionalitas ASN merujuk pada penilaian dari Kementerian PANRB</p>	NO.	DIMENSI	BOBOT	1.	Kualifikasi	25%	2.	Kompetensi	40%	3.	Kinerja	30%	4.	Disiplin	5%	NO.	NILAI	TINGKAT	1.	91 – 100	Sangat Tinggi	2.	81 – 90	Tinggi	3.	71 – 80	Sedang	4.	61 – 70	Rendah	5.	60 ke bawah	Sangat Rendah
NO.	DIMENSI	BOBOT																																			
1.	Kualifikasi	25%																																			
2.	Kompetensi	40%																																			
3.	Kinerja	30%																																			
4.	Disiplin	5%																																			
NO.	NILAI	TINGKAT																																			
1.	91 – 100	Sangat Tinggi																																			
2.	81 – 90	Tinggi																																			
3.	71 – 80	Sedang																																			
4.	61 – 70	Rendah																																			
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah																																			
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja																																					
9.	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dengan jumlah seluruh pekerja dalam periode waktu tertentu.	$\text{Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah orang yang kerja}} \times 100\%$																																	
				(Sumber: Permenaker Nomor 12 Tahun 2017)																																	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
10.	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun adalah perbandingan jumlah penambahan wirausaha baru dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah wirausaha baru periode waktu (tahun) sebelumnya.	$\text{Persentase peningkatan wirausaha baru} = \frac{\text{Jumlah wirausaha baru}_t - \text{Jumlah wirausaha baru}_{t-1}}{\text{jumlah wirausaha baru}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Di mana:  t = jumlah wirausaha baru tahun pengamatan  t-1 = jumlah wirausaha baru tahun sebelumnya</p>
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya investasi				
11.	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	Nilai investasi menunjukkan besaran atau jumlah investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (domestik) dan/atau penanaman modal asing dalam periode waktu tertentu.	$\text{Total Nilai Investasi} = \text{Nilai Investasi PMA} + \text{Nilai Investasi PMDN}$
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan				
12.	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan.	$\text{Laju Pertumbuhan}_{\text{industri pengolahan}} = \frac{(\text{PDRB}_{\text{industri pengolahan}}_t - \text{PDRB}_{\text{industri pengolahan}}_{t-1})}{\text{PDRB}_{\text{industri pengolahan}}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Di mana:  t = PDRB tahun pengamatan  t-1 = PDRB tahun sebelumnya</p>
13.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar	$\text{Laju Pertumbuhan}_{\text{pertanian,kehutanan,perikanan}} = \frac{(\text{PDRB}_{\text{pertanian,kehutanan,perikanan}}_t - \text{PDRB}_{\text{pertanian,kehutanan,perikanan}}_{t-1})}{\text{PDRB}_{\text{pertanian,kehutanan,perikanan}}_{t-1}} \times 100\%$

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
			harga konstan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Di mana: t = PDRB tahun pengamatan t-1 = PDRB tahun sebelumnya
14.	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.	$\text{Laju Pertumbuhan}_{\text{penyediaan akomodasi}} = \frac{(PDRB \text{ penyediaan akomodasi}_t - PDRB \text{ penyediaan akomodasi}_{t-1})}{PDRB \text{ penyediaan akomodasi}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Di mana: t = PDRB tahun pengamatan t-1 = PDRB tahun sebelumnya</p>
Sasaran 2.2.3. Meningkatnya daya saing daerah				
15.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensi, merupakan rata-rata dari indikator <math display="block">\text{Dimensi} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{indikator}_i}{n}</math> </li> <li>• Pilar, merupakan rata-rata dari dimensi <math display="block">\text{Pilar} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{dimensi}_i}{n}</math> </li> <li>• Aspek, merupakan rata-rata dari pilar <math display="block">\text{Aspek} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{pilar}_i}{n}</math> </li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks, merupakan rata-rata dari aspek <math display="block">\text{Indeks} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{aspek}_i}{n}</math> </li> </ul>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																								
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Komponen IDSD terdiri dari 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 78 indikator</li> </ul> <p>Kategori Indeks Daya Saing Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NILAI</th> <th>KATEGORI</th> <th>WARNA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>0 – 1,25</td> <td>Rendah</td> <td>Merah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1,26 – 2,50</td> <td>Sedang</td> <td>Kuning</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>2,51 – 3,75</td> <td>Tinggi</td> <td>Hijau</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3,76 – 5</td> <td>Sangat Tinggi</td> <td>Biru</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tidak Mengisi</td> <td>-</td> <td>Abu-abu</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NILAI	KATEGORI	WARNA	1.	0 – 1,25	Rendah	Merah	2.	1,26 – 2,50	Sedang	Kuning	3.	2,51 – 3,75	Tinggi	Hijau	4.	3,76 – 5	Sangat Tinggi	Biru	5.	Tidak Mengisi	-	Abu-abu
NO.	NILAI	KATEGORI	WARNA																									
1.	0 – 1,25	Rendah	Merah																									
2.	1,26 – 2,50	Sedang	Kuning																									
3.	2,51 – 3,75	Tinggi	Hijau																									
4.	3,76 – 5	Sangat Tinggi	Biru																									
5.	Tidak Mengisi	-	Abu-abu																									
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan																												
16.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$																								
17.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah waktu atau jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk yang telah berusia 25 tahun atau lebih. RLS dihitung hanya untuk penduduk	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$																								

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
			berusia 25 tahun keatas karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut mereka telah mengakhiri proses pendidikan.	
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				
18.	Kabupaten Sehat	Predikat	Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.	<p>Tatanan Kabupaten/Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;</li> <li>2) Kawasan sarana lalu lintas tertib adan pelayanan transportasi;</li> <li>3) Kawasan pertambangan sehat;</li> <li>4) Kawasan hutan sehat;</li> <li>5) Kawasan industri dan perkantoran sehat;</li> <li>6) Kawasan pariwisata sehat;</li> <li>7) Ketahanan pangan dan gizi;</li> <li>8) Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;</li> <li>9) Kehidupan sosial yang sehat.</li> </ol> <p>Setiap dua tahun sekali, Kabupaten/Kota Sehat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, diberikan penghargaan Swasti Saba di mana terdapat 3 kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghargaan <b>Padapa</b>, diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya memilih 2 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat;</li> <li>• Setiap kabupaten/kota mencakup 51-60% kecamatan;</li> <li>• Tiap tatanan melaksanakan 51-60% dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat;</li> <li>• Tiap kegiatan dapat dipilih sekurang-kurangnya satu indikator program (fisik, atau soseskbud) atau kesehatan (ksakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator adanya gerakan masyarakat dari indikator yang tersedia.</li> </ul> </li> <li>2. Penghargaan <b>Wiwerda</b>, diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan dengan kriteria sebagai berikut:</li> </ol>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA																								
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kabupaten/kota memilih 3-4 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat;</li> <li>• Setiap kabupaten/kota mencakup 61-70% kecamatan;</li> <li>• Tiap tatanan melaksanakan 61-70% dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat;</li> <li>• Tiap tatanan telah terintegrasi aspek fisik, sosial/budaya, ekonomi dan kesehatan;</li> <li>• Tiap kegiatan dapat dipilih lebih dari satu indikator program (fisik, atau soseskbud) atau kesehatan (ksakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator adanya gerakan masyarakat dari indikator yang tersedia.</li> </ul> <p>3. Penghargaan <b>Padapa</b>, diberikan kepada Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pengembangan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kabupaten/kota memilih 5 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat;</li> <li>• Setiap kabupaten/kota mencakup 70% kecamatan;</li> <li>• Tiap tatanan melaksanakan 70% dari semua kegiatan, termasuk lembaga masyarakat;</li> <li>• Tiap tatanan telah terintegrasi aspek fisik, sosial/budaya, ekonomi dan kesehatan;</li> <li>• Tiap kegiatan memilih beberapa indikator program (fisik, atau soseskbud) atau kesehatan (ksakitan/kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan) dan satu indikator adanya gerakan masyarakat dari indikator yang tersedia.</li> </ul> <p>Pembobotan:</p> <table border="1" data-bbox="1477 1149 2205 1479"> <thead> <tr> <th data-bbox="1477 1149 1559 1190">NO.</th> <th data-bbox="1559 1149 2016 1190">UNSUR</th> <th data-bbox="2016 1149 2205 1190">BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1477 1190 1559 1226">1.</td> <td data-bbox="1559 1190 2016 1226">Forum Kabupaten/Kota</td> <td data-bbox="2016 1190 2205 1226">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1226 1559 1261">2.</td> <td data-bbox="1559 1226 2016 1261">Tim Pembina</td> <td data-bbox="2016 1226 2205 1261">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1261 1559 1297">3.</td> <td data-bbox="1559 1261 2016 1297">Dukungan Pemda</td> <td data-bbox="2016 1261 2205 1297">16%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1297 1559 1333">4.</td> <td data-bbox="1559 1297 2016 1333">Forum Komunikasi</td> <td data-bbox="2016 1297 2205 1333">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1333 1559 1369">5.</td> <td data-bbox="1559 1333 2016 1369">Pokja</td> <td data-bbox="2016 1333 2205 1369">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1369 1559 1446">6.</td> <td data-bbox="1559 1369 2016 1446">Cakupan pelaksanaan (tatanan, kecamatan, kelurahan/desa)</td> <td data-bbox="2016 1369 2205 1446">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1477 1446 1559 1479">7.</td> <td data-bbox="1559 1446 2016 1479">Indikator</td> <td data-bbox="2016 1446 2205 1479">8%</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	UNSUR	BOBOT	1.	Forum Kabupaten/Kota	20%	2.	Tim Pembina	20%	3.	Dukungan Pemda	16%	4.	Forum Komunikasi	12%	5.	Pokja	12%	6.	Cakupan pelaksanaan (tatanan, kecamatan, kelurahan/desa)	12%	7.	Indikator	8%
NO.	UNSUR	BOBOT																										
1.	Forum Kabupaten/Kota	20%																										
2.	Tim Pembina	20%																										
3.	Dukungan Pemda	16%																										
4.	Forum Komunikasi	12%																										
5.	Pokja	12%																										
6.	Cakupan pelaksanaan (tatanan, kecamatan, kelurahan/desa)	12%																										
7.	Indikator	8%																										



NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
				(Sumber: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat)
Sasaran 3.2.1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah				
19.	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat pelayanan dan pemerataan akses pelayanan dasar yang dapat dijangkau masyarakat. Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi air minum, sanitasi dan penyehatan, serta mobilitas.	$\text{Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar} = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses pada semua pelayanan dasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pada layanan air minum</li> </ul> $\text{Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum dasar} = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses pada air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pada layanan sanitasi dasar</li> </ul> $\text{Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasar} = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pada mobilitas dasar</li> </ul> $\text{Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas dasar} = \frac{\text{Jumlah penduduk kota dan desa dengan akses pada layanan mobilitas dasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pada fasilitas penyehatan dasar</li> </ul>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
				<p style="text-align: center;"><i>Persentase penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar</i></p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>(Sumber: Metadata Indikator TPB Indonesia Pilar Sosial)</i></p>
20.	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	Indeks infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait infrastruktur Pekerjaan Umum yang meliputi: jalan, drainase, dan irigasi.	<p style="text-align: center;"><i>Indeks Infrastruktur PU</i></p> $= (50\% \text{ jalan kondisi baik}) + (30\% \text{ layanan drainase kabupaten}) + (20\% \text{ rasio irigasi})$
21.	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait Perumahan dan Permukiman yang meliputi: rumah layak huni, sanitasi air limbah domestik layak, penanganan persampahan dan air minum layak.	<p style="text-align: center;"><i>Indeks Infrastruktur Perkim</i></p> $= (40\% \text{ akses rumah layak huni}) + (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) + (20\% \text{ sanitasi penanganan persampahan}) + (15\% \text{ akses air minum layak})$
<b>Sasaran 3.2.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>				
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKL)$ <p>Di mana:            IKA = Indeks Kualitas Air            IKU = Indeks Kualitas Udara            IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
23.	Indeks Risiko Bencana	Angka	Indeks Risiko Bencana (IRB) menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah atau kawasan yang dihitung dengan memperhatikan tiga komponen, yaitu bahaya (ancaman), kerentanan dan kapasitas.	$Risiko = Bahaya \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahaya (<i>hazard</i>) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu kejadian bencana. Komponen bahaya mencakup jenis bencana yang mungkin terjadi</li> <li>• Kerentanan (<i>vulnerability</i>) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li> <li>• Kapasitas (<i>capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah.</li> </ul>
Sasaran 3.3.1. Menurunnya tingkat kemiskinan				
24.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index-P1</i> ), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Di mana:</p> <p><math>\alpha = 1</math>  <math>z =</math> garis kemiskinan  <math>y_i =</math> rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, <math>y_i &lt; z</math>  <math>q =</math> jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  <math>n =</math> jumlah penduduk</p> <p>*Indeks Kedalaman Kemiskinan merujuk pada hasil perhitungan BPS</p>
25.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	Indeks Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index-P2</i> ) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Di mana:</p> <p><math>\alpha = 2</math>  <math>z =</math> garis kemiskinan</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
			semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.	$y_i = \text{rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, } y_i < z$ $q = \text{jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$ $n = \text{jumlah penduduk}$  *Indeks Keparahan Kemiskinan merujuk pada hasil perhitungan BPS
Sasaran 3.3.2. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial				
26.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah / pendapatan terendah).	<p><i>Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</i></p> $= \frac{\text{Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)}}{\text{Jumlah penduduk miskin dan rentan}} \times 100\%$ <p>(Sumber: Metadata Indikator TPB Indonesia Pilar Sosial)</p>
27.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.	<p><i>Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</i></p> $= \frac{\text{Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama}} \times 100\%$ <p>(Sumber: Metadata Indikator TPB Indonesia Pilar Sosial)</p>
28.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah perbandingan antara jumlah	<p><i>Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</i></p>

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
			penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan yang seharusnya menerima jaminan sosial.	$= \frac{\text{jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%$

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP.19710602 200604 1 005

**KOP SURAT SESUAI INSTANSI**

KEPUTUSAN KEPALA (*nama PD...*) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: ...../2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN (*...nama PD....*) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA (*...nama PD...*) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ....Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (*...nama PD...*) Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala (*...nama PD...*);

- Mengingat : 1. ....
2. ....
3. dst...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (*...nama PD...*) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (*...nama PD...*) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (*...nama PD...*) Kabupaten Belitung Timur, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (*...nama PD...*) Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (*...nama PD...*) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (*...nama PD...*) Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal ....bulan.., tahun...

KEPALA (...nama PD.....)  
Kabupaten Belitung Timur,  
ttd  
(Nama Lengkap dan Titel)  
(Pangkat/Golongan)  
(NIP.....)

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD...)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR


Nama PD : .....

Urusan Pemerintahan : 1.  
2.  
3.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	SumberData

KEPALA (...nama PD.....)  
Kabupaten Belitung Timur,  
ttd  
(Nama Lengkap dan Titel)  
(Pangkat/Golongan)  
(NIP.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, SH.  
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN